

E3.08v



94

# PERANAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh

Lamhot P. Manalu  
Peneliti BPPT

Disampaikan dalam

FORUM SILATURAHMI ANTAR KELOMPOK PETANI  
SE KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA, 22 – 23 MEI 2001

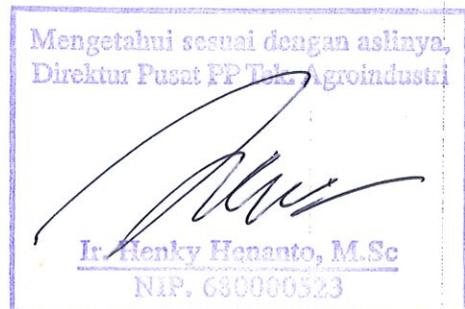
Thema :

KELOMPOK TANI SEBAGAI PUSAT INFORMASI MASYARAKAT PETANI  
DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN TAHUN 2003

2001

**PERPUSTAKAAN**

No. Induk	041226/H/04
Klasifikasi	IL 98
Subjek	- PLS - kw
Harga / Asal	
Pemb. / Had / Tk	
Katalog	Entri: 5-11-04
Dit.	03-09-2004



# PERANAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DI ERA OTONOMI DAERAH<sup>1</sup>

Oleh : Ir. Lamhot P. Manalu, M.Si<sup>2</sup>

## RINGKASAN

Agroindustri sebagai suatu sistem yang terpadu dapat menjadi basis perekonomian rakyat serta pilar perekonomian daerah. Untuk itu pemerintah daerah didorong untuk menghasilkan kebijakan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembang dan meningkatnya daya saing produk unggulan dan produk andalan daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan pemerintah daerah hendaknya diarahkan untuk mendorong : (1) peningkatan efisiensi usaha dan ekspor komoditas agribisnis dan agroindustri, (2) peningkatan sarana dan prasarana serta kelembagaan pertanian, (3) reposisi peran agribisnis menjadi basis perekonomian rakyat dan agroindustri sebagai pilar perekonomian daerah, (4) pengembangan pola dan iklim investasi yang kondusif.

Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif maka program yang perlu mendapatkan prioritas oleh pemerintah daerah antara lain adalah : (1) pengembangan produk unggulan dan produk andalan menjadi paket usaha mandiri dalam masyarakat, (3) pengembangan sistem insentif yang adil bagi investasi agribisnis dan agroindustri, (4) pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan daerah, (5) peningkatan dukungan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi dan komoditas, (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (7) peningkatan kelembagaan agribisnis dan agroindustri yang menciptakan kesetaraan pelaku, (8) peningkatan dukungan pemasaran komoditas, (9) peningkatan dukungan industri penunjang agribisnis dan (10) pengembangan kerjasama antar daerah serta dengan luar negeri.

## I. PENGANTAR

Tidak terbantahkan bahwa pertanian, agribisnis dan agroindustri telah tampil sebagai penyelamat bangsa dari kebangkrutan perekonomian sebagai dampak dari krisis yang melanda Indonesia sejak 1997. Hal yang sama terjadi pada saat AS mengalami krisis ekonomi pada tahun 1926. Hal tersebut disebabkan karena daya saing dan daya tangkal produk pertanian terhadap gejolak perekonomian global sangat tinggi. Walaupun demikian, upaya menjadikan pertanian sebagai sektor andalan masih terbatas dalam tataran konsep, bahkan tidak sedikit komponen bangsa yang tetap menganggap bahwa pertanian adalah beban pembangunan nasional. Sebagai negara agraris, tidak dapat dipungkiri bahwa basis ekonomi Indonesia adalah pertanian.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena konsepsi pembangunan pertanian yang dikembangkan selama ini terus dilandaskan pada pemikiran "bagaimana petani bisa hidup dari pertanian" bukan " bagaimana memajukan pertanian melalui pendekatan bisnis". Sebagai gambaran, walaupun konsep agroindustri masuk dalam GBHN tahun 1993, namun baru pertama kali "diucapkan" Menteri Pertanian pada awal tahun 1997.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Forum Silaturahmi Antar Kelompok Petani Se Kalimantan Timur, di Samarinda tanggal 22 – 23 Mei 2001

<sup>2</sup> Peneliti Teknologi Agroindustri BPPT

Bahkan pengembangan teknologi pertanian di Indonesia selama pemerintahan orde baru diposisikan pada posisi terakhir untuk pengembangan teknologi di Indonesia.

Sebagai penyelamat perekonomian nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa basis perekonomian bangsa Indonesia adalah pertanian yang dikembangkan dalam bentuk agribisnis dan agroindustri. Dengan demikian, maka komoditas pertanian hendaknya tidak hanya dipandang sebagai komoditas perdagangan, tetapi sebagai bahan baku industri dengan mengoptimalkan pendayagunaan seluruh komponen yang terkandung di dalamnya.

Kondisi tersebut menghendaki agar pengembangan pertanian bertumpu pada pemanfaatan teknologi. Pemerintah tidak akan bisa lagi alergi dengan pemanfaatan teknologi, termasuk teknologi maju untuk mengantisipasi berlakunya pasar bebas. Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi maka pengembangan produk agribisnis dan agroindustri diarahkan untuk produk unggulan dan produk andalan daerah.

## II. PARAN TEKNOLOGI DALAM SISTEM AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

### 1. Sistem Agribisnis dan Agroindustri

Kegiatan pertanian yang dikelola dalam bentuk usaha dapat berbentuk agribisnis dan agroindustri. agribisnis adalah **seluruh operasi** yang terjadi dalam kegiatan manufaktur dan distribusi yang bersumber dari pertanian; produksi pada *on-farm*, penyimpanan, dan distribusi komoditas dan produk yang dihasilkan (Gilbert dan Davis, 1957). Sebagai suatu sistem, agribisnis terdiri dari 5 (lima) subsistem, yaitu :

- 1) **Subsistem input pertanian.** Mencakup aktivitas yang terkait dengan pengadaan input pertanian berupa : bibit/benih, pupuk, pestisida/insektisida, serta sarana dan prasarana.
- 2) **Subsistem produksi atau budidaya.** Mencakup aktivitas proses produksi seperti kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.
- 3) **Subsistem pengolahan.** Mencakup aktivitas pengolahan hasil pertanian, berupa penanganan pasca panen, penyimpanan, dan pengemasan.
- 4) **Subsistem pemasaran.** Mencakup aktivitas yang terkait dengan proses perdagangan dan distribusi produk pertanian.
- 5) **Subsistem pendukung.** Mencakup aktivitas yang terkait dengan penyediaan dana, teknologi, SDM, sistem perpajakan dan lain-lain.

Agroindustri adalah perusahaan yang mengolah bahan-bahan yang berasal dari tanaman dan hewan. Pengolahan meliputi transformasi dan pengawetan melalui perubahan fisik atau kimia, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi (Austin, 1992). Sistem agroindustri terdiri dari 4 (empat) subsistem yang terkait, yaitu :

- 1) **Subsistem rantai produksi.** Mencakup aktivitas proses suatu produk yang memanfaatkan bahan baku yang bersumber dari kegiatan pertanian, seperti kegiatan pasca panen, proses pengolahan, dan peralatan dan mesin agroindustri.
- 2) **Subsistem kebijakan.** Mencakup aktivitas yang terkait dengan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agroindustri.
- 3) **Subsistem institusional atau kelembagaan.** Mencakup aktivitas yang terkait dengan manajemen pengelolaan usaha agroindustri.
- 4) **Subsistem distribusi dan pemasaran atau internasional.** Mencakup aktivitas yang terkait dengan transportasi, distribusi, dan yang menyangkut interdependensi antara suatu negara dengan pasar internasional.

Dari pengertian tersebut terlihat adanya kesamaan antara pengertian agribisnis dan agroindustri. Agroindustri lebih menitikberatkan pada analisis pemanfaatan produk pertanian sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk yang siap dimanfaatkan atau dikonsumsi atau siap diolah lebih lanjut menjadi produk baru oleh suatu lembaga yang dikelola dengan manajemen profesional untuk memasuki pasar baik domestik maupun global.

## 2. Jenis dan Peran Teknologi

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam agribisnis dan agroindustri ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi, dan efektivitas seluruh aktivitas dalam subsistem. Untuk itu, terdapat 7 (tujuh) kelompok teknologi yang terkait dengan agribisnis dan agroindustri yang memerlukan pengkajian yang mendalam, yaitu :

- 1) **Teknologi Pembibitan.** Ditujukan untuk mendapatkan bibit dan benih yang bermutu tinggi dengan indikator berupa : produktivitas, daya tahan terhadap penyakit, kualitas, dan keseragaman produk.
- 2) **Teknologi Pengolahan Lahan atau Media.** Ditujukan untuk menyediakan tempat atau media tumbuh atau pengembangan tanaman, mikroba, ikan, atau ternak.
- 3) **Teknologi Budidaya.** Ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, pengendalian hama dan penyakit, efisiensi penggunaan input (pupuk, insektisida, pestisida dll) dan teknologi pemanenan.
- 4) **Teknologi Pasca Panen.** Ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas, memperpanjang masa simpan, memudahkan sistem transportasi dan distribusi produk pertanian, serta sebagai tahapan untuk diproses lebih lanjut menjadi produk lain/baru.
- 5) **Teknologi Alat dan Mesin Agroindustri.** Ditujukan untuk mengembangkan dan memanfaatkan cara, teknik, atau metode yang terkait dengan desain, rancang bangun, rekayasa, serta perbaikan kinerja peralatan dan mesin agroindustri untuk penanganan pasca panen, proses, dan diversifikasi produk untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang bersaing.
- 6) **Teknologi Proses dan Diversifikasi Produk.** Ditujukan untuk mengembangkan dan memanfaatkan cara, teknik, atau metode untuk mengolah produk pertanian menjadi produk lain atau produk baru yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
- 7) **Manajemen.** Ditujukan untuk mengembangkan dan memanfaatkan cara, teknik, atau metode pengelolaan sumber daya (input) agroindustri berupa bahan baku, teknologi,

SDM, dan dan informasi untuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan agroindustri.

Pengembangan teknologi agroindustri tersebut diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan dan daya saing usaha yang bergerak dalam bidang agribisnis dan agroindustri di daerah.

Pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis teknologi di era otonomi memerlukan tekonologi dengan kriteria sebagai berikut : (1) tepat guna (*appropriate*), (2) meningkatkan nilai tambah, (3) meningkatkan daya saing, (4) mudah digunakan oleh masyarakat luas (*instant*), dan (5) secara nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penentuan prioritas untuk penguasaan teknologi dapat menggunakan kriteria pendekatan nilai tambah dengan menganalisis secara mendalam pengembangan "pohon industri" komoditas pertanian.

Perwujudan agroindustri sebagai industri primer unggulan tidak hanya ditentukan oleh tingkat penguasaan teknologi, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi, kebijakan yang antisipatif, dan sistem (ke)pemerintahan yang baik (*good governance*).

### III. ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

Pengembangan agribisnis dan agroindustri hendaknya *diarahkan* untuk : (1) mewujudkan suatu agroindustri yang memiliki daya saing yang tinggi, memiliki daya tahan terhadap gejolak ekonomi, mampu mengantisipasi permintaan pasar, serta (4) mampu mendorong terjadinya pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Program pengembangan agroindustri hendaknya *ditujukan* untuk menciptakan produk unggulan dan andalan yang memiliki karakteristik spesifik daerah.

Produk *unggulan* merupakan hasil dari pemanfaatan potensi daerah berupa produk atau komoditas yang memiliki daya saing di pasar domestik, nasional, dan global tetapi juga dapat dihasilkan oleh daerah lain. Sedangkan **produk andalan** merupakan komoditas atau produk yang dihasilkan dan memiliki *ciri khas* tersendiri dari daerah tersebut sehingga memiliki daya saing di pasar. Produk unggulan suatu daerah dapat dihasilkan dari pendayagunaan potensi yang dimiliki sehingga menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif agar daya saingnya di pasar semakin meningkat. Sedangkan produk andalan daerah dihasilkan dari kemampuan untuk menghasilkan produk khas yang timbul dari keterampilan dan kemampuan masyarakat atau kemampuan mendayagunakan keunggulan komparatif. Sebagai contoh produk unggulan Sulawesi Selatan antara lain adalah kakao, mete, dan hasil laut; sedangkan produk andalanya berupa sarung sutera mandar, kopi toraja, coto makassar, dan konro.

Upaya untuk mempertahankan daya saing produk unggulan dan produk andalan ditempuh dengan strategi yang berbeda. Mempertahankan daya saing produk unggulan dititikberatkan pada upaya meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tersebut. Sedangkan untuk mempertahankan daya saing produk andalan, selain langkah tersebut, juga harus didukung oleh upaya menjaga konsistensi kekhasan produk yang dihasilkan.

#### IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Era otonomi yang bersamaan dengan era globalisasi menuntut adanya 2 (dua) strategi dasar pemerintah dalam pengembangan agroindustri, yaitu : peningkatan daya saing asset (*competitiveness of the asset*), serta peningkatan daya saing proses (*competitiveness of the process*). Peningkatan daya saing asset hendaknya dilakukan melalui 4 (empat) kebijakan utama, yaitu : (1) peningkatan kualitas SDM, (2) peningkatan kapasitas IPTEK, (3) penyediaan infrastruktur industri dan perdagangan, dan (4) peningkatan akses terhadap sumber keuangan. Sedangkan peningkatan untuk peningkatan daya saing proses dilaksanakan melalui : (1) penciptaan *good governance*, (2) peningkatan hubungan internasional, dan (3) peningkatan kemampuan manajemen.

Penciptaan *good governance* merupakan hal yang penting dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri. Dengan pemerintahan yang baik diharapkan akan terjadi kesamaan peluang dalam masyarakat untuk mendayagunakan potensi pertanian. Artinya masyarakat akan memiliki akses yang sama dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Selain itu, peran pemerintah akan semakin mengarah sebagai pelindung terhadap komponen masyarakat yang lemah untuk mewujudkan kesetaraan.

Untuk memacu pengembangan agribisnis, Pemerintah Daerah dituntut agar secara optimum menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu : (1) sebagai pendorong pembangunan ekonomi (*economic governance*), (2) penataan kehidupan politik (*politic governance*), dan (3) pelaksana administrasi publik (*administrative governance*). Dalam *economic governance*, perlu mengembangkan mekanisme dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*) yang dapat mengakomodir seluruh aktivitas ekonomi dalam masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan menyongsong globalisasi perdagangan.

Dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan pengembangan agribisnis, faktor yang mendesak untuk diselesaikan anatara lain adalah : (1) permasalahan kesetaraan aktor/pelaku agribisnis, (2) penataan kepemilikan faktor produksi (terutama kepemilikan lahan), dan (3) peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah yang berbasis pertanian bukan hanya menilikberalkan pada upaya peningkatan PAD tetapi hendaknya lebih diarahkan agar menjadi pilar utama pemberdayaan rakyat. Pemberdayaan rakyat melalui pengembangan agribisnis dapat berjalan dengan baik apabila kebijakan Pemerintah Daerah mengarah pada : (1) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, (2) perwujudan pemerataan pembangunan, dan (3) menciptakan produk agribisnis unggulan dan andalan melalui pewilayahan komoditas.

Ketiga arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan dalam program pembangunan yang mengarah pada : (1) penciptaan suasana (*enabling*) agar kreativitas dan motivasi masyarakat untuk maju dan berkembang meningkat, (2) bersama dunia usaha dan masyarakat melakukan penguatan (*encourage*) kompetensi agribisnis, (3) menciptakan kesetaraan pelaku agribisnis melalui perlindungan (*protection*) pada masyarakat lemah,

(4) penataan distribusi penguasaan sumberdaya agribisnis (terutama penguasaan lahan), dan (5) pembukaan akses terhadap sumberdaya agribisnis (dana, teknologi, dan pasar), serta (6) peningkatan nilai tambah produk agribisnis rakyat melalui pengembangan agroindustri kerakyatan.

Bagi daerah yang berbasis pertanian dan bercita-cita menjadikan agribisnis sebagai basis perekonomian rakyat dan agroindustri sebagai pilar perekonomian daerah, maka setiap kebijakan dan strategi yang dirumuskan didasarkan pada visi pembangunan daerah yang mengarah pada upaya *mewujudkan agribisnis dan agroindustri sebagai basis dan perekonomian daerah*. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, terdapat minimal 4 (empat) misi yang harus diemban bagi pengembangan usaha di bidang agribisnis dan agroindustri, yaitu :

- 1) Meningkatkan pendapatan petani dan pelaku agribisnis dan agroindustri melalui kenaikan nilai tambah produk.
- 2) Menciptakan kelembagaan pertanian yang tangguh yang dapat menopang pengembangan agribisnis dan agroindustri.
- 3) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pada sektor pertanian dan agroindustri.
- 4) Meningkatkan akses pasar, teknologi, dan dana untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Untuk melaksanakan misi tersebut, dibutuhkan minimal 5 (lima) strategi, yaitu :

- 1) Meningkatkan kemampuan sarana dan parasana yang terkait dengan pembangunan pertanian, agribisnis dan agroindustri.
- 2) Meningkatkan peran pengusaha di daerah melalui peningkatan kemampuan permodalan dan perluasan jaringan.
- 3) Meningkatkan peran teknologi untuk menaikkan nilai tambah dan perbaikan mutu produk.
- 4) Meningkatkan kemampuan SDM.
- 5) Memperkuat kelembagaan agroindustri menghadapi persaingan global dan diberlakukannya otonomi daerah.

Strategi tersebut hendaknya diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah yang mencakup hal-hal berupa :

- 1) Pengembangan sarana dan parasarana industri dan perdagangan.
- 2) Pemberian kemudahan (kalau perlu pemberian insentif) terhadap pelaku usaha agribisnis dan agroindustri.
- 3) Pengembangan kerjasama dan jaringan perdagangan dan investasi dengan daerah lain atau luar negeri.
- 4) Peningkatan pemanfaatan teknologi tetapy guna.
- 5) Pengembangan paket usaha agroindustri unggulan yang berbasis pada penerapan teknologi.
- 6) Pengembangan kualitas SDM agroindustri.

Dalam jangka pendek diperlukan adanya penajaman program yang dititikbertakan pada dua fokus, yaitu internal dan eksternal. Program internal mencakup hal-hal :

- 1) Penyusunan Perda investasi bidang agribisnis dan agroindustri, peningkatan investasi agroindustri.
- 2) Diseminasi teknologi.
- 3) Pengembangan kemampuan permodalan daerah.
- 4) Peningkatan daya saing, pengembangan sarana pendukung.
- 5) Penataan fungsi koperasi agroindustri.
- 6) Pengembangan kelembagaan pemasaran.
- 7) Pemasyarakatan system kendali mutu.
- 8) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan daerah lain.
- 9) Penataan kerjasama antar lembaga.
- 10) Pengembangan jaringan antar daerah.

## V. PENUTUP

Dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri, pemerintah hendaknya mampu mengendalikan kebijakan agar tidak terjadi kegagalan pasar (*market failure*). Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghasilkan kebijakan yang dapat menghindari terjadinya kegagalan persaingan (*failures of competition*), terjadinya eksternalitas, ketidakterbatasan akses terhadap sumber daya (*open access resources*), dan kegagalan informasi (*information failures*). Hal tersebut sangat terkait dengan kemampuan untuk mengendalikan permasalahan makroekonomi (*macroeconomic problems*) dan masalah ketidakseimbangan kepemilikan.

Kondisi yang diharapkan terjadi di era otonomi adalah adanya perubahan secara bertahap (*incremental change*) bagi daerah yang bermula dari upaya mengurangi ketergantungan dari pusat (*dependence*), menuju kemandirian daerah (*independence*), yang pada akhirnya mencapai bentuk ideal berupa saling ketergantungan (*interdependence*) antar pusat dan daerah, antar daerah dengan pusat, dan antar daerah satu dengan lainnya.

Pengembangan agroindustri hendaknya **diarahkan** untuk : (1) mewujudkan suatu agroindustri yang memiliki daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun di pasar global, (2) memiliki daya tahan terhadap gejolak ekonomi dengan meningkatkan kandungan lokal, (3) mampu mengantisipasi permintaan pasar, serta (4) mampu mendorong terjadinya pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Program pengembangan agroindustri hendaknya **ditujukan** untuk menciptakan produk unggulan dan andalan yang memiliki karakteristik spesifik daerah. Untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, melalui pengembangan dan penguasaan teknologi proses agroindustri kita harus terus melakukan diversifikasi produk sehingga kita dapat melakukan peningkatan dan perluasan pasar.

## PUSTAKA

- Anonimus. 2000. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Penerbit Restu, Jakarta.
- Austin J. E. 1992. *Agroindustrial Project Analysis*. The Johns Hopkins University Press, Maryland.
- Downey W. D. and S. P. Erickson. 1987. *Agribusiness Management*. McGraw-Hill International Inc., New York.
- Dunn, W.N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua Terjemahan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta;
- Geovanie, J. 1995. *APEC dan Tantangan Indonesia*. CV Simplex, Jakarta.
- Nasoetion, M. 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Ekonomi : Implementasi dalam Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Porter M. E. 1994. *Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Terjemahan. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Salusu, J, 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*; PT. Grasindo, Jakarta;
- Said Didu, M. *Membangun Agroindustri yang Berdaya Saing Global*. Majalah AGRIMEDIA, Volume 5 – Nomor 2, Juli 1999.
- Said Didu, M. 2001. *Mewujudkan Agribisnis dan Agroindustri sebagai Motor Penggerak Perekonomian Daerah*. Dialog Terbuka "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan : Prospek dan Tantangannya". Badan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Ajatappareng. Jakarta 18 Januari 2001